

TINGKAT EFIKASI POLITIK MAHASISWA DISABILITAS DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PADA PILKADA 2020

Umi Khoiriyah

(S1 PPKn, FISH, Universitas Negeri Surabaya, umikhoiriyaah@gmail.com)

Maya Mustika Kartika Sari

PPKn, FISH, Universitas Negeri Surabaya, mayamustika@unesa.ac.id)

Abstrak

Tingkat efikasi politik penting dalam partisipasi politik, sebab keduanya saling berkaitan. Oleh sebab itu, apabila tingkat efikasi politik seseorang rendah, maka tingkat partisipasi politiknya juga rendah. Meneliti tingkat efikasi politik mahasiswa disabilitas menjadi sesuatu yang menarik, sebab bagi pemilih disabilitas mereka tidak terlalu tertarik dengan kehidupan politik, karena mereka menganggap partisipasinya tidak dapat memberikan perubahan yang berarti, sehingga menyebabkan tingkat efikasi politiknya rendah. Sedangkan, tingkat efikasi politik mahasiswa tinggi, karena tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat efikasi politik seseorang. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan tingkat efikasi politik mahasiswa disabilitas di Unesa pada pilkada 2020. Metode penelitian adalah kuantitatif jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, tingkat efikasi politik mahasiswa disabilitas di Unesa sangat tinggi, karena memiliki persentase 86,905%. Responden dalam penelitian adalah 28 mahasiswa disabilitas di Unesa, 20 responden termasuk dalam kategori sangat tinggi, 4 responden termasuk dalam kategori tinggi dan 4 responden termasuk dalam kategori sedang. Tingkat efikasi politik dibedakan menjadi efikasi politik internal dan efikasi politik eksternal. Efikasi politik internal mahasiswa disabilitas di Unesa tergolong sangat tinggi, karena memiliki persentase 86,1%. Efikasi politik eksternal mahasiswa disabilitas di Unesa tergolong sangat tinggi, karena memiliki persentase 87,5%. Efikasi politik eksternal responden lebih tinggi daripada efikasi politik internal, karena tingkat pendidikan responden. Orang yang berpendidikan tinggi (lebih dari SMA) memiliki efikasi politik eksternal yang lebih tinggi daripada efikasi politik internal.

Kata Kunci: mahasiswa disabilitas, efikasi politik, pilkada.

Abstract

The level of political efficacy is important in political participation, because the two are interrelated. Therefore, if a person's level of political efficacy is low, the level of political participation is also low. Researching the political efficacy level of disabled students is interesting, because for disabled voters they are not too interested in political life, because they consider their participation unable to provide significant changes, thus causing a low level of political efficacy. Meanwhile, the level of student political efficacy is high, because the level of education affects a person's level of political efficacy. The purpose of the study was to describe the level of political efficacy of disabled students at Unesa in the 2020 elections. The research method was quantitative descriptive type. The results showed that the political efficacy level of disabled students at Unesa was very high, because it had a percentage of 86.905%. Respondents in the study were 28 disabled students at Unesa, 20 respondents were in the very high category, 4 respondents were in the high category and 4 respondents were in the medium category. The level of political efficacy is divided into internal political efficacy and external political efficacy. The internal political efficacy of disabled students at Unesa is very high, because it has a percentage of 86.1%. The external political efficacy of disabled students at Unesa is very high, because it has a percentage of 87.5%. Respondent's external political efficacy is higher than internal political efficacy, because of the respondent's education level. People who are highly educated (more than high school) have higher external political efficacy than internal political efficacy.

Keywords: students with disabilities, political efficacy, regional elections.

PENDAHULUAN

Keadaan disabilitas dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Menurut *World Health Organization* (2011:29), lebih dari satu miliar orang atau sekitar 15% orang di dunia diperkirakan hidup dengan disabilitas. Disabilitas menurut Gregory (dalam Mattila dan Achillefs, 2017:2), adalah konstruksi sosial yang menerjemahkan kondisi kesehatan menjadi patologi sosial yang dapat

membatasi orang untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Hal senada juga dijelaskan oleh Supena, dkk. (2017:1), penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami hambatan dalam melaksanakan aktivitas tertentu, sehingga membutuhkan alat bantu khusus, seperti penyandang disabilitas tunarungu membutuhkan media visual untuk mengakses informasi. Keadaan disabilitas membuat seseorang memiliki keterbatasan ketika

melakukan kegiatan tertentu, namun tidak membuat orang tersebut kehilangan haknya sebagai warga negara.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, seperti warga negara lain. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1. Kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan hingga perguruan tinggi semakin terbuka lebar ketika pemerintah mengesahkan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus pada Pendidikan Tinggi. Permendikbud ini mengatur mengenai pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi bagi mahasiswa disabilitas, mulai dari memberikan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas, menyediakan layanan khusus bagi mahasiswa disabilitas, serta penyediaan kuota khusus bagi penyandang disabilitas. Produk hukum tersebut, memberikan jaminan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas pada bidang pendidikan tinggi.

Kesetaraan bagi penyandang disabilitas tidak hanya pada bidang pendidikan saja, namun juga dalam kehidupan politik. Kesetaraan politik berarti memberikan hak yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilu. Hal ini dijamin oleh UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43. Jaminan hak pemilih disabilitas diperkuat melalui UU Nomor 8 tahun 2016 khususnya pasal 13 yang menjelaskan bahwa negara telah menjamin hak politik penyandang disabilitas, mulai dari kebebasan berpartisipasi dalam pemilu, memperoleh aksesibilitas dalam pemilu hingga pendidikan politik. Beberapa produk hukum tersebut semakin menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi di ranah politik.

Jaminan hak politik bagi penyandang disabilitas membuat mereka dapat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Berdasarkan hasil penelitian Zainal, dkk. (2018:114), dapat diketahui bahwa pemilih disabilitas di Yayasan Yukartuni Makassar didatangi oleh tim sukses dan calon anggota legislatif untuk berkampanye melalui media elektronik pada pileg 2014. Senada dengan Udin ketua PSLD (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas) Unesa, berdasarkan hasil wawancara pada 13 November 2020 menyatakan, bahwa salah satu mahasiswa disabilitas di Unesa menjadi relawan dalam pilpres 2019 di Surabaya. Hal ini menunjukkan, bahwa pemilih disabilitas ikut berpartisipasi di berbagai kehidupan politik. Menurut Gaffar (1997:10), kegiatan ikut berpartisipasi dalam kampanye dan menjadi relawan termasuk dalam *electoral activity*. *Electoral activity* merupakan partisipasi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pemilu. Kegiatan tersebut dapat berupa menjadi sukarelawan dalam

kampanye, memberikan suara dalam pemilu, dan mengawasi pelaksanaan pemilu (Gaffar, 1997:10).

Secara normatif jaminan hak partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu telah dijamin oleh negara. Namun, dalam praktiknya partisipasi pemilih disabilitas masih rendah. Rendahnya partisipasi pemilih disabilitas dapat diketahui dari hasil penelitian Sabatini (2018:10), yang menjelaskan bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2017 hanya sebesar 45% dari 20 responden yang di data. Demikian juga, dengan hasil penelitian Budi (2019:194), yang menunjukkan bahwa pada pilgub Jateng 2018 partisipasi pemilih disabilitas hanya 25,67%. Beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada kegiatan pemilu masih rendah.

Partisipasi politik berhubungan dengan tingkat efikasi politik. Oleh sebab itu, apabila tingkat efikasi politiknya rendah maka tingkat partisipasinya juga rendah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Zainulmillah (2017:6-7), yang menjelaskan bahwa rendahnya tingkat efikasi politik yang dimiliki oleh seseorang, membuat orang tersebut tidak percaya dalam melakukan kegiatan politik dan tidak mempercayai sistem demokrasi yang terjadi. Senada dengan Budi (2019:194-195), yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada pilgub Jateng 2018 rendah dan hanya menunjukkan 25,67%, karena tingkat efikasi politik pemilih disabilitas rendah. Tingkat efikasi politik pemilih disabilitas di Jawa Tengah rendah, karena mereka beranggapan bahwa partisipasinya tidak akan memberikan perubahan berarti. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak percaya terhadap kapasitas dirinya dan tidak percaya terhadap sistem demokrasi yang sedang berlangsung. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa tingkat efikasi politik pemilih disabilitas mempengaruhi partisipasinya dalam kegiatan politik.

Tingkat efikasi politik yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi partisipasi politik orang tersebut. Bahwasanya, efikasi politik merupakan perasaan individu yang merasa bahwa tindakan politiknya memiliki dampak pada proses politik (Campbell, dkk., dalam Caprara, dkk., 2009:1002). Dengan kata lain, individu tersebut merasa bahwa tindakan politiknya berguna dalam proses politik. Sedangkan, menurut Matulesy (2008:54), efikasi politik atau *political efficacy* adalah kemampuan individu untuk berperan atau mempengaruhi sistem politik. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa efikasi politik merupakan perasaan seseorang yang menganggap partisipasinya dalam kehidupan politik dapat memberikan pengaruh pada sistem politik. Oleh sebab itu, apabila seseorang memiliki tingkat efikasi politik yang tinggi, maka orang tersebut akan percaya pada kemampuannya

untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan membuat perubahan pada sistem politik.

Efikasi politik dibedakan menjadi efikasi politik internal dan efikasi politik eksternal. Caprara, dkk. (2009:1002), menjelaskan bahwa efikasi politik internal berkaitan dengan keyakinan individu mengenai kemampuannya untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam ranah politik. Efikasi politik eksternal berkaitan dengan keyakinan seseorang bahwa sistem politik dapat diubah melalui pengaruh individu maupun kolektif. Senada dengan Acock dan Clarke (1990:93), efikasi politik internal merupakan rasa kompetensi politik subjektif atau kemampuan pribadi secara umum. Efikasi politik eksternal menyangkut persepsi tentang daya tanggap pemerintah. Menurut Bannet (dalam Acock dan Clarke, 1990:93), efikasi politik eksternal, kepercayaan politik, dan daya tanggap pemerintah merupakan dasar untuk membentuk orientasi penilaian terhadap pemerintah. Dari pengertian beberapa ahli dapat ditarik kesimpulan, bahwa efikasi politik internal berkaitan dengan keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk berpengaruh dalam bidang politik. Sedangkan efikasi politik eksternal berkaitan dengan penilaian individu terhadap sistem politik yang dapat diubah berdasarkan pada daya tanggap pemerintah.

Mempelajari efikasi politik harus dikaitkan dengan teori kognitif sosial, sebab efikasi politik mempelajari perilaku seseorang dalam mengambil tindakan politik. Sedangkan, teori kognitif sosial membantu dalam memahami tindakan politik seseorang yang berfokus pada penilaian yang dipegang oleh seseorang tentang kapasitas dirinya untuk berpartisipasi dalam ranah politik (Caprara, dkk. 2009:1003). Efikasi politik berkaitan dengan efikasi diri, sebab menurut Bandura (2006:307), efikasi diri merupakan keyakinan orang pada kemampuan mereka untuk pencapaian hasil yang diinginkan. Efikasi diri berkaitan dengan keyakinan tentang kemungkinan hasil. Kemungkinan hasil berkaitan dengan keyakinan individu tentang hasil yang akan dicapai. Dengan kata lain, seseorang akan melakukan tindakan politik apabila orang tersebut dapat merasakan manfaat dari tindakannya. Namun, orang tersebut tidak akan melakukan tindakan politik apabila mereka tidak yakin dengan hasil yang akan dicapai.

Efikasi yang dirasakan seseorang sangat berpengaruh dalam diri orang tersebut, karena perilaku seseorang sesuai dengan efikasi yang dirasakan. Menurut Bandura (dalam Bandura 2006:309), efikasi tidak hanya berpengaruh secara langsung, tetapi dengan dampaknya pada penentu lain, seperti tujuan dan aspirasi, ekspektasi hasil, serta peluang di lingkungan sosial. Pengertian efikasi dari Bandura tersebut dapat menjawab pertanyaan pada penelitian Caprara, dkk. (2009:1017), yang

menjelaskan bahwa, terdapat orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang masalah politik dan mendapat informasi yang baik, namun tidak ikut berpartisipasi dalam politik. Kejadian tersebut dapat dijelaskan melalui pengertian efikasi dari Bandura (2006:309), seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik tentang politik, namun dia tidak berpartisipasi, karena mereka merasa hasil yang diharapkan tidak akan dicapai atau kurang efektif dalam pencapaian hasilnya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tingkat efikasi politik berkaitan dengan kepentingan politik orang tersebut.

Hubungan efikasi politik dan kepentingan politik seseorang, sesuai dengan pendapat Verba, dkk. (dalam Sohl, 2010:7), efikasi politik berkaitan erat dengan kepentingan politik. Pendapat tersebut sesuai dengan hasil penelitian Budi (2019:194-195), tingkat efikasi politik pemilih disabilitas di Purbalingga rendah. Sehingga, mereka enggan berpartisipasi pada pilgub Jateng 2018, karena mereka menganggap partisipasinya tidak akan memberikan perubahan bagi kehidupan mereka. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki kepentingan yang diperjuangkan. Akibatnya, tingkat efikasi politiknya rendah.

Penelitian ini akan difokuskan pada tingkat efikasi politik dari mahasiswa disabilitas. Menurut Verba, dkk. (dalam Caprara, dkk. 2009:1005), pendidikan akan memperkuat rasa efikasi politik dengan mendorong keterlibatan psikologis dan kognitif dalam politik, sebab orang dengan pendidikan tinggi memiliki lebih banyak pengetahuan yang membantu dalam proses politik. Begitupun berdasarkan hasil penelitian Acock dan Clarke (1990:97); Caprara, dkk. (2009:1008), menjelaskan bahwa orang yang berpendidikan tinggi (pendidikan lebih dari SMA) memiliki tingkat efikasi politik yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah (orang yang berpendidikan SMA atau lebih rendah). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan yang tinggi akan memperkuat tingkat efikasi politik seseorang.

Pendidikan tinggi akan memperkuat tingkat efikasi politik seseorang. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian Matulesy dan Samsul (2013:99), yang menjelaskan bahwa tingginya partisipasi politik mahasiswa dalam demonstrasi salah satunya disebabkan oleh tingginya tingkat efikasi politik mahasiswa. Hal senada juga diungkapkan oleh Fitriah (2014:251-252), mahasiswa di UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki tingkat efikasi politik yang tinggi. Dari beberapa hasil penelitian tersebut dapat diketahui, bahwa tingginya tingkat efikasi politik mahasiswa, karena pendidikan tinggi yang dimiliki. Oleh sebab itu, peneliti akan

memfokuskan pada tingkat efikasi politik mahasiswa disabilitas di Unesa.

Penelitian ini dilakukan di Unesa, karena Unesa memiliki Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD), serta memiliki Program Studi Kependidikan (dikutip dari Unesa.ac.id diakses 09 Agustus 2020). Prodi Kependidikan yang dimiliki Unesa lebih banyak apabila dibandingkan dengan Universitas Negeri lain di Jawa Timur, seperti data berikut ini.

Tabel 1 Enam Universitas Negeri Terbaik di Jawa Timur dalam Penyediaan Layanan Disabilitas bagi Mahasiswa Disabilitas

No.	Universitas	Pusat Studi dan Layanan Disabilitas	Program Studi Kependidikan S-1
1.	Universitas Brawijaya	Tersedia	3
2.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Belum Tersedia	-
3.	Universitas Airlangga	Belum Tersedia	-
4.	Universitas Jember	Belum Tersedia	13
5.	Universitas Negeri Malang	Belum Tersedia	37
6.	Universitas Negeri Surabaya	Tersedia	37

Sumber: Urutan Universitas (dikutip dari lldikti5.kemdikbud.go.id diakses 30 Januari 2021), Jumlah Program Studi Kependidikan (dikutip dari ub.ac.id, its.ac.id, unair.ac.id, unej.ac.id, um.ac.id, unesa.ac.id diakses 30 Januari 2021)

Berdasarkan Tabel 1 jumlah jurusan kependidikan di Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Malang sama, yaitu 37 Program Studi Kependidikan S-1. Namun Universitas Negeri Malang belum memiliki PSLD. PSLD berfungsi sebagai sarana bagi KPU untuk menyosialisasikan kegiatan pemilu kepada mahasiswa disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian Zainal, dkk. (2018:116), partisipasi pemilih disabilitas rendah, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPU kepada pemilih disabilitas. Hal senada juga diungkapkan oleh Al-Haroma (2017:592), melalui hasil penelitiannya yang menjelaskan, bahwa KPUD hanya menyosialisasikan kepada komunitas disabilitas saja, sedangkan tidak semua pemilih disabilitas bergabung dalam komunitas. Oleh sebab itu, dibutuhkan PSLD di setiap Universitas untuk memudahkan KPUD dalam memberikan sosialisasi kepada pemilih disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PSLD Unesa pada 25 Januari 2021, dapat diketahui bahwa KPU melalui relawan demokrasi melakukan sosialisasi ke PSLD Unesa.

Peran PSLD (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas) dalam kehidupan politik mahasiswa disabilitas dapat dilihat ketika Pemira (Pemilihan Umum Raya) yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali di Unesa. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PSLD Unesa pada tanggal 08 Februari 2020, setiap pelaksanaan pemira, pihak KPU Universitas akan meminta tolong ke PSLD

untuk membuat *template* surat suara yang berbraille, agar tercipta pemira yang aksesibel bagi pemilih disabilitas netra di Unesa. Selain itu, relawan PSLD akan mendampingi mahasiswa disabilitas rungu ketika kampanye dialogis Pasangan Calon yang mengikuti pemira.

Program studi kependidikan bertujuan untuk menghasilkan calon guru. Guru memiliki peran yang penting dalam dunia pendidikan. Menurut Haryanti (2016:71), secara mikro praktek kependidikan bertumpu kepada peran guru. Selain itu, guru merupakan agen sosialisasi politik. Berdasarkan hasil penelitian Purwanto (2008:1); Hie (2018:i), guru merupakan agen sosialisasi politik yang berperan dalam membentuk kesadaran peserta didik mengenai tanggung jawab sebagai warga negara. Oleh sebab itu, perlu untuk meneliti tingkat efikasi politik calon guru di Universitas, karena mahasiswa Prodi Kependidikan akan menjadi guru dan menyosialisasikan kesadaran politik kepada peserta didik.

Berdasarkan data dari PSLD Unesa dapat diketahui, dari 35 mahasiswa disabilitas di Unesa terdapat 21 mahasiswa disabilitas yang terdaftar dalam Prodi Kependidikan. Dengan kata lain, 60% mahasiswa disabilitas di Unesa akan menjadi calon guru. Dengan demikian, apabila calon gurunya memiliki tingkat efikasi politik yang tinggi, maka akan mudah dalam mengembangkan kesadaran politik peserta didik. Hal tersebut karena, calon gurunya telah memiliki pengetahuan yang baik tentang politik. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PSLD Unesa pada 25 Januari 2021, di Unesa terdapat mata kuliah wajib umum Pendidikan Pancasila yang diberikan ke seluruh mahasiswa, sehingga secara teoritis semua mahasiswa disabilitas memiliki pengetahuan yang baik terkait politik.

Efikasi politik mahasiswa disabilitas di Unesa akan diukur melalui partisipasinya pada pilkada 2020. Pilkada 2020 diikuti oleh 28 mahasiswa disabilitas Unesa, mulai dari angkatan 2016-2020 berdasarkan data dari PSLD Unesa yang diperoleh tanggal 11 Desember 2020. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah yang hendak dijawab adalah bagaimana tingkat efikasi politik mahasiswa disabilitas di Universitas Negeri Surabaya pada pilkada 2020.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif jenis deskriptif, untuk mendeskripsikan tingkat efikasi politik mahasiswa disabilitas di Unesa pada pilkada 2020. Populasi dalam penelitian adalah semua mahasiswa disabilitas yang terdata oleh PSLD Unesa. Berdasarkan data yang diperoleh dari ketua PSLD Unesa pada 24 Oktober 2020. Jumlah mahasiswa disabilitas angkatan tahun 2016-2020 adalah 35 mahasiswa. Teknik *sampling*

penelitian ini adalah *sampling purposive*. Kriteria yang digunakan oleh peneliti sebagai sampel adalah semua mahasiswa disabilitas yang ikut berpartisipasi dalam pilkada 2020 dan bersedia untuk menjadi responden. Berdasarkan kriteria yang dibuat oleh peneliti, maka didapatkan data 28 mahasiswa disabilitas di Unesa yang menjadi sampel penelitian. Sebanyak tujuh mahasiswa disabilitas tidak menjadi responden dalam penelitian, karena tidak mengikuti pilkada 2020. Hal ini disebabkan karena daerah tempat tinggal tujuh mahasiswa disabilitas tersebut tidak menyelenggarakan pilkada 2020. Beberapa daerah tempat tinggal mahasiswa tersebut di antaranya Jombang, Sampang, Klungkung, Madiun, dan Probolinggo tidak melaksanakan pilkada serentak 2020, sebab pilkada serentak akan dilaksanakan pada 2023 (Adriansyah, 2021:1).

Variabel dalam penelitian adalah variabel tunggal, yaitu tingkat efikasi politik. Definisi operasional variabel dari tingkat efikasi politik yang dimaksud dalam penelitian adalah tinggi rendahnya efikasi politik internal dan efikasi politik eksternal yang dimiliki oleh mahasiswa disabilitas di Unesa. Efikasi politik internal berkaitan dengan penilaian terhadap kemampuan dirinya dalam berpartisipasi di ranah politik untuk mencapai tujuannya. Efikasi politik eksternal berkaitan dengan penilaian responden terhadap sistem politik yang dapat diubah apabila terlibat dalam kehidupan politik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian berupa angket. Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian adalah angket berstruktur dengan jawaban tertutup, karena peneliti telah menyediakan alternatif jawaban pada setiap itemnya (Ali, 2013:96). Angket penelitian akan dikirimkan kepada responden secara daring melalui Google Form. Instrumen penelitian akan mengadaptasi indikator instrumen yang telah dibuat oleh Bandura (2006:307-311), untuk mengukur efikasi politik internal mahasiswa disabilitas. Sedangkan, untuk mengukur efikasi politik eksternal mahasiswa disabilitas di Unesa, peneliti mengadaptasi indikator yang telah dibuat oleh Caprara, dkk. (2009:1003-1009); Sohl, (2010:9). Modifikasi instrumen yang dilakukan peneliti berupa jumlah instrumen serta topik instrumen yang disesuaikan dengan permasalahan yang sedang dihadapi pemilih disabilitas. Skala yang digunakan dalam penelitian adalah skala Guttman.

Instrumen yang dirancang oleh Bandura (2006:307-311), terdiri dari indikator pengalaman penguasaan, indikator pengalaman perwakilan, indikator persuasi verbal, dan indikator keadaan fisiologis/afektif. Beberapa Indikator tersebut dirancang untuk mengukur efikasi politik internal yang dirasakan seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Bandura (2006:320-335), membuat beberapa instrumen yang dapat digunakan sebagai

pedoman. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengadaptasi indikator yang telah dibuat. Salah satu instrumen yang dibuat adalah mengukur efikasi politik internal seseorang dalam meminta dukungan dari orang tua dan masyarakat. Pada indikator persuasi verbal, instrumen yang digunakan yaitu, mengajak orang di luar komunitas menaruh minat pada komunitas yang diikuti. Dari instrumen tersebut responden disuruh menilai pada skala antara 0-100. Berdasarkan pedoman yang sudah dibuat oleh Bandura (2006:320-335), peneliti mengadaptasi indikator persuasi verbal dengan membuat instrumen sejenis. Instrumen tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan persuasi verbal mahasiswa disabilitas di Unesa untuk mengajak teman dan keluarga agar memilih kandidat yang dipercaya.

Instrumen hasil adaptasi yang digunakan peneliti untuk mengukur efikasi politik internal mahasiswa disabilitas di Unesa akan diukur dengan empat indikator. Pertama, indikator pengalaman penguasaan mengacu pada pengalaman aktual ketika melakukan tindakan dalam bidang politik, seperti memilih dalam pilkada. Indikator pengalaman penguasaan mengukur perasaan kepuasan terhadap kemampuan yang dimiliki dalam memilih kandidat pada pemilu yang diikuti sebelumnya. Apabila mahasiswa disabilitas merasakan kepuasan dengan pilihan sebelumnya, maka ketika pilkada 2020 mereka akan percaya diri dalam menentukan kandidat yang dipilih, karena mereka merasa memiliki kemampuan dalam memilih kandidat yang akan memperjuangkan kepentingannya. Kedua, indikator pengalaman perwakilan terjadi ketika seseorang percaya, bahwa melakukan tindakan politik bersama orang lain akan menghasilkan dampak yang lebih besar. Ketiga, indikator persuasi verbal diukur dari cara responden membangun penilaian individu terhadap persuasi verbal yang diperoleh dari orang lain, hingga kemampuan persuasi verbal tersebut menjadi kemampuan mahasiswa disabilitas. Keempat, indikator keadaan fisiologis/afektif menguji kepercayaan diri responden dalam menentukan pilihan di tengah keterbatasan yang dimiliki. Keadaan fisiologis yang dimaksud adalah keadaan disabilitas dari responden sedangkan afektif yang dimaksud adalah perasaan responden ketika memilih pada pilkada 2020.

Instrumen untuk mengukur efikasi politik eksternal yang dirancang oleh Caprara, dkk. (2009:1003-1009); Sohl, (2010:9), terdiri dari indikator penilaian individu terhadap sistem politik, indikator penilaian individu terhadap lembaga penyelenggaraan pemilu, dan indikator penilaian individu terhadap prosedur pemungutan suara. Salah satu instrumen yang dibuat oleh Caprara, dkk. (2009:1012), pada indikator penilaian terhadap sistem politik yaitu merasa terlibat dalam politik dan bekerja untuk partai politik. Instrumen yang dirancang oleh

Caprara, dkk. (2009:1003-1009), berfokus pada peran seseorang dalam sistem politik dengan cara bekerja dalam kelompok untuk warga. Sedangkan instrumen hasil modifikasi peneliti berfokus pada peran seseorang untuk merubah sistem politik melalui kegiatan pilkada. Selain itu, penilaian terhadap sistem politik juga mengacu pada daya tanggap pemerintah dalam merespon aspirasi mahasiswa disabilitas. Indikator penilaian individu terhadap lembaga penyelenggaraan pemilu pada pilkada 2020, menguji penilaian responden terhadap akses informasi, serta sosialisasi yang dilakukan KPU ketika pilkada 2020. Indikator penilaian individu terhadap prosedur pemungutan suara menguji pemahaman responden terhadap prosedur pemungutan suara selama proses transfer informasi dari lembaga penyelenggara pemilu kepada responden.

Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan SPSS Statistic 25. Validitas dan reliabilitas instrumen dihitung melalui SPSS Statistic 25 (Dewi, 2018:6-9). Persentase tingkat efikasi politik akan dihitung menggunakan rumus persentase dari Ali (2013:201). Data pada hasil angket akan dikategorikan kedalam kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Hasil kategori akan didukung dengan uraian tabel kemudian dihitung persentase pada tiap-tiap indikator tingkat efikasi politik. Hasil persentase tiap-tiap indikator akan disajikan melalui diagram batang untuk memudahkan dalam membaca dan memahami data hasil penelitian, sesuai dengan tabel berikut ini.

Tabel 2 Kategori Tingkat Efikasi Politik Mahasiswa Disabilitas Unesa

Interval	Kriteria
75% - 100%	Sangat Tinggi
60% - 74%	Tinggi
40% - 59%	Sedang
25% - 39%	Rendah
0 - 24%	Sangat Rendah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian memberikan gambaran mengenai tingkat efikasi politik mahasiswa disabilitas di Unesa pada pilkada 2020. Mahasiswa disabilitas di Unesa yang menjadi responden berjumlah 28 mahasiswa dengan jumlah responden perempuan berjumlah 16 mahasiswa dan responden laki-laki berjumlah 12 mahasiswa. Setiap mahasiswa disabilitas di Unesa yang menjadi responden memiliki keterbatasan masing-masing mulai dari lima mahasiswa tunanetra, satu mahasiswa *low vision*, empat mahasiswa tunadaksa, satu mahasiswa tunagrahita, sembilan mahasiswa tunarungu, empat mahasiswa autis, tiga mahasiswa *slow learner* dan satu mahasiswa *down syndrome*. Masing-masing responden tersebar di Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu

Pendidikan, Fakultas Teknik, serta Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Peneliti ingin menguji apakah keterbatasan yang dimiliki oleh mahasiswa disabilitas mempengaruhi rendahnya tingkat efikasi politiknya, seperti pemilih disabilitas pada umumnya atau keterbatasan yang mereka miliki bukan pengaruh, karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

Data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis secara deskriptif berdasarkan pada hasil penghitungan SPSS Statistic 25. Setiap item akan diberikan skor dengan acuan pada skala Guttman yang memiliki skor tertinggi=1 dan skor terendah=0, kemudian dikategorikan menjadi lima kategori subjek pada variabel tingkat efikasi politik, yaitu subjek dengan tingkat efikasi politik sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Kategori tersebut dihitung melalui perhitungan persentase menggunakan SPSS Statistics 25. Tujuan dari pengkategorian subjek penelitian adalah untuk memudahkan peneliti dalam menafsirkan hasil penelitian di lapangan. Berikut ini hasil kategori tingkat efikasi politik tiap responden.

Tabel 3 Tingkat Efikasi Politik Mahasiswa Disabilitas Unesa

Kategori	Interval	Jumlah
Sangat Tinggi	14-18	20
Tinggi	11-13	4
Sedang	8-10	4
Rendah	5-7	0
Sangat Rendah	1-4	0

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa responden penelitian pada variabel tingkat efikasi politik yang tergolong dalam kategori sangat tinggi berjumlah 20 responden, pada kategori tinggi berjumlah empat responden, kemudian untuk kategori sedang berjumlah empat responden. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat efikasi politik yang paling banyak dimiliki oleh responden adalah mahasiswa disabilitas dengan kategori sangat tinggi berjumlah 20 responden. Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa, tidak ada mahasiswa disabilitas di Unesa yang memiliki tingkat efikasi politik dengan kategori rendah dan sangat rendah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tinggi yang dimiliki oleh mahasiswa disabilitas di Unesa memperkuat tingkat efikasi politiknya.

Pengolahan data selanjutnya adalah membuat persentase tingkat efikasi politik perdimensi dari keseluruhan responden, yaitu 28 mahasiswa disabilitas di Unesa. Tujuan dari perhitungan persentase tingkat efikasi politik perdimensi adalah untuk mengetahui tingkat efikasi politik mahasiswa disabilitas dari tiap-tiap indikator. Indikator dalam efikasi politik internal digunakan untuk menguji penilaian mahasiswa disabilitas di Unesa terkait kemampuan yang dimiliki untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Indikator dalam

efikasi politik eksternal digunakan untuk menguji kepercayaan mahasiswa disabilitas terhadap kemampuannya untuk mengubah sistem politik yang sedang berlangsung. Berikut ini hasil kategori efikasi politik internal dan eksternal mahasiswa disabilitas di Unesa.

Tabel 4 Efikasi Politik Internal Mahasiswa Disabilitas Unesa

Kategori	Interval	Jumlah
Sangat Tinggi	8-10	22
Tinggi	6-7	2
Sedang	4-5	4
Rendah	1-3	0

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa responden dengan kategori sangat tinggi pada efikasi politik internal berjumlah 22 responden, responden dengan kategori tinggi berjumlah dua responden, responden dengan kategori sedang berjumlah empat responden. Data tersebut menunjukkan bahwa 78,57% responden memiliki efikasi politik internal dengan kategori sangat tinggi.

Tabel 5 Efikasi Politik Eksternal Mahasiswa Disabilitas Unesa

Kategori	Interval	Jumlah
Sangat tinggi	7-8	20
Tinggi	5-6	5
Sedang	3-4	3
Rendah	1-2	0

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa responden dengan kategori sangat tinggi pada efikasi politik eksternal berjumlah 20 responden, responden dengan kategori tinggi berjumlah lima responden, dan responden dengan kategori sedang berjumlah tiga responden. Data tersebut menunjukkan bahwa 71,42% responden memiliki efikasi politik eksternal dengan kategori sangat tinggi. Berikut ini deskripsi dari masing-masing indikator dalam variabel tingkat efikasi politik mahasiswa disabilitas di Unesa.

Indikator Pengalaman Penguasaan Mahasiswa Disabilitas Di Unesa Pada Pilkada 2020

Pengalaman penguasaan merupakan indikator yang paling penting untuk mengukur dimensi efikasi politik internal. Pengalaman penguasaan berasal dari pengalaman aktual ketika melakukan tindakan tertentu. Pada penelitian ini tindakan yang dimaksud adalah tindakan dalam bidang politik, seperti memilih dalam pilkada. Indikator pengalaman penguasaan menantang bagi individu untuk mendapatkan perasaan pencapaian sehingga menghasilkan perasaan percaya dalam melakukan tindakan yang serupa atau mirip (Bandura, 2006:308). Dengan kata lain, apabila seseorang telah merasakan pencapaian atas tindakan sebelumnya, maka

orang tersebut akan memiliki kepercayaan diri dan keyakinan dalam melakukan tindakan yang serupa.

Indikator pengalaman penguasaan digunakan oleh peneliti untuk mengukur kepercayaan diri dari mahasiswa disabilitas dalam menentukan kandidat pada pilkada 2020. Apabila mahasiswa disabilitas telah memiliki pengalaman penguasaan yang baik sebelumnya, maka mahasiswa disabilitas di Unesa akan secara yakin memilih kandidat pada pilkada 2020, karena sebelumnya telah berhasil menentukan kandidat sesuai dengan harapannya. Berikut ini hasil penelitian di lapangan terkait indikator pengalaman penguasaan mahasiswa disabilitas di Unesa pada pilkada 2020 yang disajikan dengan diagram batang.

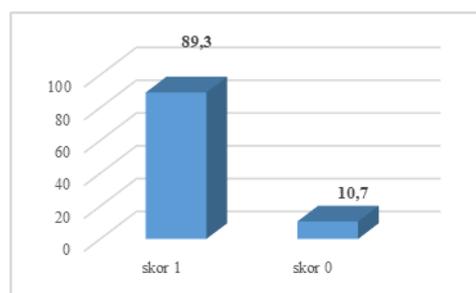


Diagram 1 Indikator Pengalaman Penguasaan

Berdasarkan diagram 1 dapat diketahui bahwa mahasiswa disabilitas di Unesa memiliki tingkat pengalaman penguasaan yang sangat tinggi, yaitu sebesar 89,28%. Menurut Bandura (2006:308), seseorang yang memiliki pengalaman penguasaan yang baik akan memberikan pengaruh terhadap kapasitas orang tersebut untuk mempengaruhi perubahan pribadi, sehingga menghasilkan restrukturisasi keyakinan yang dimanifestasikan di berbagai bidang. Dengan kata lain, responden yang memiliki pengalaman penguasaan yang sangat tinggi dan menganggap pengalaman penguasaannya sebagai sebuah prestasi yang besar, maka responden tersebut dapat mengubah penilaian serta kepercayaan dirinya dalam bertindak. Apabila awalnya mahasiswa disabilitas tidak percaya terhadap kemampuannya, maka dengan pengalaman penguasaan yang dimiliki dapat membuat responden percaya terhadap kemampuannya.

Pengalaman penguasaan yang dimiliki oleh mahasiswa disabilitas di Unesa berupa perasaan pencapaian atas tindakan yang dilakukan sebelumnya. Responden merasa bahwa kandidat yang dipilih pada pemilu sebelumnya dapat memperjuangkan aksesibilitas dan aspirasi pemilih disabilitas. Perasaan pencapaian tersebut membuat mahasiswa disabilitas merasa memiliki kemampuan dalam menentukan kandidat. Dengan demikian, pada pelaksanaan Pilkada 2020, mereka yakin dalam menentukan kandidat yang dipilih.

Deskripsi Pengalaman Perwakilan Mahasiswa Disabilitas di Unesa Pada Pilkada 2020

Pengalaman perwakilan terjadi ketika seseorang melihat orang lain melakukan tugas tertentu dan dampaknya dianggap semakin kuat apabila individu tersebut dapat mengidentifikasi dengan orang lain. Melalui pengamatannya seseorang memiliki kepercayaan bahwa dengan mengidentifikasi bersama orang lain dapat menghasilkan dampak yang lebih besar apabila dibandingkan dengan mengidentifikasi secara mandiri. Selain itu, pengalaman perwakilan dapat terjadi ketika seseorang dengan latar belakang berbeda, dan karakteristik berbeda telah mencapai sesuatu dalam kehidupan politik sehingga berdasarkan hasil pengamatannya, individu tersebut percaya bahwa ia dapat melakukan hal yang sama (Bandura, 2006:310-311). Berikut ini persentase pengalaman perwakilan mahasiswa disabilitas di Unesa.

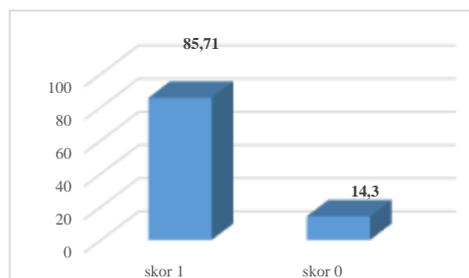


Diagram 2 Indikator Pengalaman Perwakilan

Berdasarkan diagram 2, dapat diketahui bahwa tingkat pengalaman perwakilan yang dimiliki oleh mahasiswa disabilitas di Unesa sebesar 85,71%. Tingginya tingkat pengalaman perwakilan mahasiswa disabilitas di Unesa disebabkan, karena responden mengidentifikasi para kandidat dalam pilkada bersama teman dan keluarganya. Selain itu, mereka mengamati para kandidat secara kritis, sehingga dapat mempercayai pilihannya berdasarkan kualitas para kandidat.

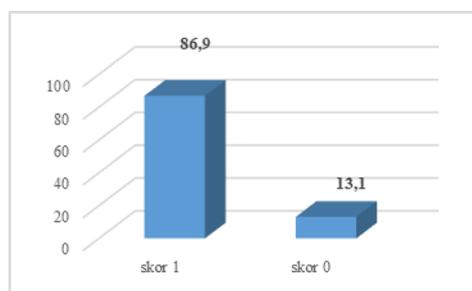
Pengalaman perwakilan terjadi ketika seseorang melihat ada kandidat yang dapat dipercaya untuk memperjuangkan kepentingannya, dan ketika pemilu ia memilih kandidat tersebut, maka ketika itu timbul pengalaman perwakilan dari orang tersebut. Pengalaman perwakilan mahasiswa disabilitas terjadi ketika mereka melihat masih ada kandidat yang dapat dipercaya untuk memperjuangkan kepentingannya, dan mereka memilihnya pada pilkada 2020. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sohl (2010:15), yang menjelaskan bahwa kunci dari indikator pengalaman perwakilan adalah ketika seseorang melihat, dan dia menjadi percaya, maka disitulah terjadi pengalaman perwakilan. Data di lapangan menunjukkan, bahwa pengalaman perwakilan dari mahasiswa disabilitas di Unesa terjadi ketika mahasiswa

disabilitas mengamati visi, misi dan program yang ditawarkan para kandidat melalui portal berita online serta mengikuti kampanye yang dilakukan para kandidat. Selama proses pengamatan yang dilakukan secara mandiri maupun bersama teman dan keluarga, mereka melihat masih ada kandidat yang memiliki *track record* serta kualitas yang baik. Berdasarkan hasil pengamatannya, mereka percaya terhadap kandidat tersebut dan memilihnya pada saat pilkada 2020.

Deskripsi Persuasi Verbal Mahasiswa Disabilitas Di Unesa Pada Pilkada 2020

Persuasi verbal pada mulanya berasal dari orang lain, kemudian menjadi penilaian individu, sehingga menjadikan orang tersebut memiliki kemampuan persuasi verbal untuk mengajak orang lain bertindak dalam hal politik (Verba, 2006:316-318). Dengan kata lain, kemampuan persuasi verbal tidak serta merta melekat pada diri seseorang, melainkan kemampuan tersebut dimiliki seseorang melalui sebuah proses yang berasal dari orang lain. Verba (2006:316-318), menjelaskan lebih lanjut, bahwa persuasi verbal dari orang lain dapat menjadi penilaian individu apabila individu tersebut memiliki kepercayaan terhadap orang yang memberikan persuasi verbal, sehingga memunculkan prediktif relatif yang pada akhirnya mereka saling bergantung untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada penelitian ini, peneliti menguji indikator persuasi verbal dimulai dari cara responden membangun penilaian individu terhadap persuasi verbal yang diperoleh dari orang lain, hingga penilaian responden terhadap kemampuan persuasi verbal yang dimiliki. Berikut ini, hasil persuasi verbal yang dimiliki oleh responden.

Diagram 3 Indikator Persuasi Verbal



Berdasarkan data pada diagram 3, dapat diketahui bahwa responden membangun penilaian persuasi verbal yang diperoleh dari orang lain melalui kegiatan kampanye yang secara aktif diikuti, sehingga mereka percaya terhadap kandidat yang dipilih pada pilkada 2020. Setelah itu, mereka mempromosikan kandidat yang dipilih kepada teman serta keluarganya. Proses yang dilakukan oleh mahasiswa disabilitas dalam membangun kemampuan persuasi verbal menghasilkan tingkat efikasi politik pada

indikator persuasi verbal sangat tinggi karena berada pada interval 75%-100%.

Deskripsi Keadaan Fisiologis/Afektif Mahasiswa Disabilitas di Unesa Pada Pilkada 2020

Keadaan fisiologis/afektif seseorang mempengaruhi kepercayaan diri dalam melakukan suatu tindakan. Oleh sebab itu, apabila individu memiliki kepercayaan diri yang lemah, karena memiliki pengalaman yang tidak mengesankan, maka orang tersebut akan mudah dibujuk oleh kesulitan atau mudah menyerah. Namun apabila seseorang memiliki kepercayaan diri yang teguh pada kemampuan mereka, maka mereka akan bertahan dalam upaya mereka, meskipun kesulitan dan rintangan yang tak terhitung banyaknya (Bandura, 2006:313-314). Dengan kata lain, kepercayaan diri dari responden memegang peranan kunci, apakah pemilih disabilitas memiliki kepercayaan diri untuk memperjuangkan kepentingannya atau menyerah dengan keadaan. Indikator keadaan fisiologis/afektif digunakan untuk menguji kepercayaan diri mahasiswa disabilitas dalam menentukan kandidat ditengah keterbatasan yang dimiliki, serta perasaan yang meliputi responden ketika memilih pada pilkada 2020. Berikut ini gambaran indikator keadaan fisiologis/afektif mahasiswa disabilitas di Unesa.

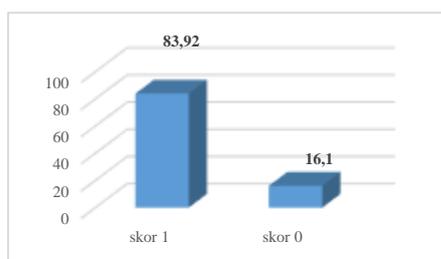


Diagram 4 Indikator Keadaan Fisiologis/Afektif

Berdasarkan diagram 4, dapat diketahui bahwa mahasiswa disabilitas di Unesa merasa, bahwa keadaan fisiologis/afektif yang dimiliki bukan suatu hambatan untuk memberikan suaranya dalam pilkada, sehingga menghasilkan tingkat efikasi politik pada indikator keadaan fisiologis/afektif sebesar 83,92%. Tingkat efikasi politik tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dapat diketahui bahwasanya, tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden membantu mereka dalam menyadari, bahwa pemilih disabilitas memiliki peran yang sama, seperti pemilih yang lain dalam kehidupan politik. Dengan kata lain, responden menganggap tidak ada perbedaan peran antara pemilih disabilitas dengan pemilih yang tidak disabilitas dalam kehidupan politik. Keadaan tersebut membuat mahasiswa disabilitas tidak merasa

terdiskriminasi ketika menyalurkan suaranya pada pilkada 2020.

Alasan mahasiswa disabilitas di Unesa tetap memilih ditengah keterbatasan yang mereka miliki, karena mereka menganggap ikut terlibat secara aktif dalam pilkada merupakan wujud kontribusi untuk memperjuangkan hak pemilih disabilitas. Selain itu, memilih pada pilkada 2020 merupakan sarana bagi responden untuk dapat bersuara tentang bagaimana pemerintah menjalankan berbagai hal.

Deskripsi Penilaian Mahasiswa Disabilitas di Unesa Pada Pilkada 2020 terhadap Sistem Politik

Penilaian terhadap sistem politik yang dimaksud adalah penilaian terhadap daya tanggap pemerintah. Penilaian terhadap sistem politik dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penilaian mahasiswa disabilitas di Unesa terhadap daya tanggap pemerintah dalam merespon aspirasi mahasiswa disabilitas, serta penilaian mahasiswa disabilitas di Unesa terhadap kesetaraan politik bagi pemilih disabilitas. Hasil penelitian pada indikator penilaian mahasiswa disabilitas di Unesa terhadap sistem politik tergambar pada diagram batang berikut ini.

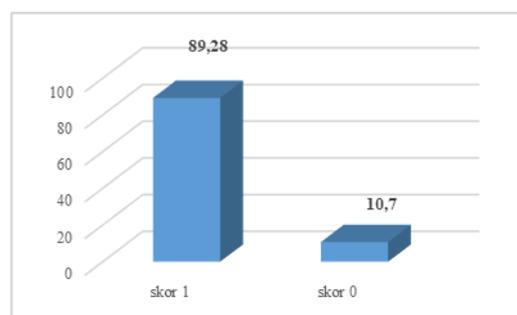


Diagram 5 Indikator Penilaian Terhadap Sistem Politik

Berdasarkan diagram 5, dapat diketahui bahwa mahasiswa disabilitas di Unesa memiliki tingkat efikasi politik pada indikator penilaian terhadap sistem politik sebesar 89,28%. Tingkat efikasi tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi. Data di lapangan menunjukkan bahwa mahasiswa disabilitas di Unesa menilai, ada beberapa kebijakan yang tidak sesuai harapan, namun mereka yakin dapat membuat perubahan dengan memberikan suaranya ketika pilkada. Selain itu, mahasiswa disabilitas di Unesa menilai, bahwa ketidaksetaraan yang terjadi pada pemilih disabilitas dapat diubah apabila mereka bersama pemilih disabilitas yang lain ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Beberapa penilaian tersebut, membuat persentase indikator penilaian terhadap sistem politik mahasiswa disabilitas di Unesa termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Deskripsi Penilaian Mahasiswa Disabilitas Di Unesa Terhadap Lembaga Penyelenggara Pemilu pada Pilkada 2020

Penilaian terhadap lembaga penyelenggara pemilu pada pilkada 2020 dimaksudkan untuk mengukur responsivitas lembaga penyelenggara pemilu pada pilkada 2020 yang dirasakan oleh responden ketika memberikan suaranya. Berikut ini, gambaran indikator penilaian mahasiswa disabilitas di Unesa terhadap lembaga penyelenggara pemilu pada pilkada 2020.

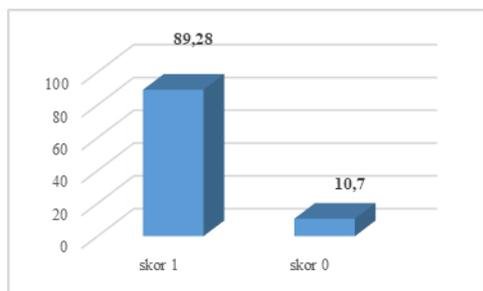


Diagram 6 Indikator Penilaian Terhadap Lembaga Penyelenggara pemilu pada Pilkada 2020

Berdasarkan pada diagram 6, dapat diketahui bahwa indikator penilaian mahasiswa disabilitas di Unesa terhadap lembaga penyelenggara pemilu pada pilkada 2020 sebesar 89,28%. Tingginya persentase indikator tersebut didasarkan pada penilaian mahasiswa disabilitas di Unesa terkait responsivitas KPU dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan mahasiswa disabilitas untuk memilih dalam pilkada. Responsivitas tersebut berupa tersedianya surat suara braille dan tidak ada TPS yang bertangga. Keadaan tersebut membuat mahasiswa disabilitas menilai, bahwa KPU telah memberikan aksesibilitas bagi mahasiswa disabilitas pada pilkada 2020. Selain itu, responsivitas KPU yang dirasakan mahasiswa disabilitas di Unesa juga dalam proses pendataan daftar pemilih tetap (DPT). Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dapat diketahui bahwa KPU telah memastikan mahasiswa disabilitas di Unesa beserta kelompok disabilitas lain terdaftar sebagai DPT.

Penilaian mahasiswa disabilitas yang baik terhadap lembaga penyelenggara pemilu pada pilkada 2020 didukung dengan adanya PSLD di Unesa. Keberadaan PSLD di Universitas berguna untuk membantu KPU beserta relawan demokrasi dalam menyosialisasikan pelaksanaan pilkada kepada mahasiswa disabilitas. Data di lapangan menunjukkan bahwa dari 28 responden, terdapat 24 mahasiswa disabilitas yang tidak mengalami kesulitan dalam memahami pelaksanaan pilkada, sebab mereka menganggap sosialisasi yang dilakukan oleh KPU cukup jelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PSLD Unesa pada 02 Juli 2021, mahasiswa disabilitas di

Unesa mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPU melalui Zoom Meetings, karena pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi *covid-19*. KPU bekerja sama dengan PSLD Unesa untuk mengumpulkan mahasiswa disabilitas yang mengikuti pilkada 2020 agar memperoleh sosialisasi. Keadaan tersebut membuat mahasiswa disabilitas di Unesa memiliki persentase yang sangat tinggi pada indikator penilaian terhadap lembaga penyelenggara pemilu pada pilkada 2020.

Deskripsi Penilaian Mahasiswa Disabilitas Di Unesa Pada Pilkada 2020 Terhadap Prosedur Pemungutan Suara

Efikasi politik eksternal berkaitan dengan penilaian individu terhadap daya tanggap pemerintah, yang berkaitan dengan pemilihan umum (Acock dan Clarke, 1990:95). Di dalam pemilu terdapat proses yang informatif antara lembaga penyelenggara pemilu dengan calon pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Penilaian individu terhadap prosedur pemungutan suara dapat menjadi jembatan bagi seseorang untuk memilih dalam pemilu. Menurut Caprara, dkk. (2009:1004), seseorang yang memiliki penilaian yang baik terkait prosedur pemungutan suara akan mengekspresikan pemahamannya dengan tindakan sebagai wujud otonomi individu. Dengan kata lain, apabila seseorang memiliki penilaian yang baik terhadap prosedur pemungutan suara, maka orang tersebut akan mengekspresikan otonomi individunya dengan cara memberikan suaranya ketika pemilu. Pada penelitian ini, indikator penilaian terhadap prosedur pemungutan suara digunakan untuk menguji apakah mahasiswa disabilitas di Unesa mampu mengekspresikan otonomi individunya dalam kegiatan pilkada 2020. Apabila mahasiswa disabilitas mampu mengekspresikan otonomi individunya dalam pilkada 2020, maka dapat diartikan bahwa mahasiswa disabilitas telah memiliki pemahaman yang baik terkait prosedur pemungutan suara. Gambaran indikator penilaian mahasiswa disabilitas di Unesa terhadap prosedur pemungutan suara tersaji pada diagram batang berikut ini.

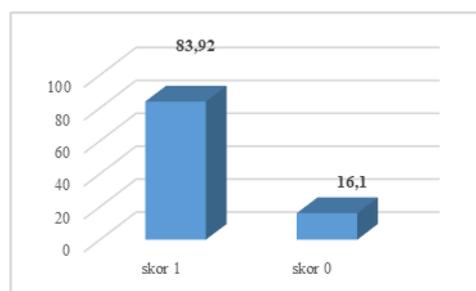


Diagram 7 Indikator Penilaian Terhadap Prosedur Pemungutan Suara

Berdasarkan diagram 7, dapat diketahui bahwa mahasiswa disabilitas di Unesa memiliki tingkat efikasi politik pada indikator penilaian terhadap prosedur pemungutan suara sebesar 83,92%. Tingginya persentase pada indikator tersebut menunjukkan, bahwa mahasiswa disabilitas di Unesa telah memiliki pemahaman yang baik terhadap prosedur pemungutan suara. Data di lapangan menunjukkan alasan mahasiswa disabilitas di Unesa memiliki penilaian yang baik terhadap prosedur pemungutan suara, karena mereka secara aktif mencari informasi terkait prosedur pemungutan suara melalui internet. Kemudahan akses yang dimiliki oleh mahasiswa disabilitas membuat mereka tidak mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pemungutan suara.

Ada tujuh indikator untuk mengukur tingkat efikasi politik mahasiswa disabilitas di Unesa pada saat pilkada 2020. Dari tujuh indikator tersebut dapat diketahui rata-rata dari masing-masing dimensi efikasi politik internal dan efikasi politik eksternal, sehingga diperoleh rata-rata efikasi politik internal dan efikasi politik eksternal, sebagai berikut.

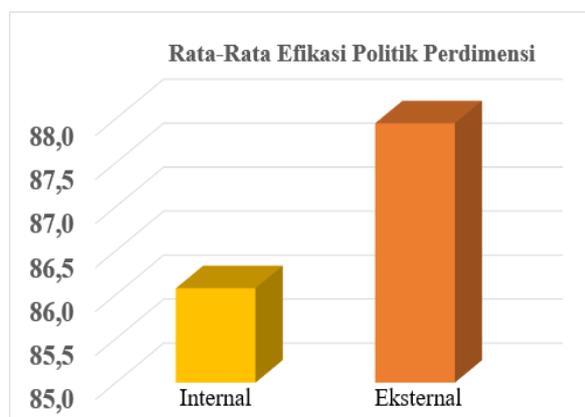


Diagram 8 Rata-Rata Perdimensi Tingkat Efikasi Politik Mahasiswa Disabilitas di Unesa

Berdasarkan diagram 8, dapat diketahui rata-rata efikasi politik internal sebesar 86,1%. Sedangkan, rata-rata efikasi politik eksternal mahasiswa disabilitas di Unesa adalah 87,9%. Kedua dimensi tingkat efikasi politik tersebut tergolong sangat tinggi karena berada pada interval 75%-100%. Untuk menghitung tingkat efikasi politik mahasiswa disabilitas di Unesa pada pilkada 2020 secara keseluruhan dihitung melalui rumus persentase dari Ali (2013:201), sehingga dapat diketahui bahwa tingkat efikasi politik mahasiswa disabilitas di Unesa sebesar 86,905%.

Tingkat efikasi politik mahasiswa disabilitas di Unesa sangat dipengaruhi oleh efikasi politik internal dan efikasi politik eksternal. Efikasi politik internal mahasiswa disabilitas di Unesa sangat dipengaruhi oleh indikator pengalaman penguasaan dengan persentase

89,28%. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa disabilitas di Unesa telah yakin dalam memilih kandidat pada pilkada 2020 karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, pemilih disabilitas telah berhasil memilih kandidat yang dapat memperjuangkan kepentingannya. Efikasi politik eksternal sangat dipengaruhi oleh indikator penilaian terhadap sistem politik dan indikator penilaian terhadap lembaga penyelenggara pemilu pada pilkada 2020 dengan persentase sebesar 98,28%. Hal ini menunjukkan, bahwa responsivitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa disabilitas di Unesa pada pilkada 2020 membuat mereka memiliki keyakinan bahwa sistem politik dapat diubah apabila mahasiswa disabilitas ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Efikasi politik eksternal mahasiswa disabilitas di Unesa lebih tinggi apabila dibandingkan dengan efikasi politik internalnya. Menurut Acock dan Clarke (1990:99), yang meneliti stabilitas relatif dari efikasi politik di Amerika menjelaskan terkait alasan seseorang memiliki efikasi politik eksternal yang lebih tinggi daripada efikasi politik internal. Seseorang memiliki efikasi politik eksternal lebih tinggi daripada efikasi politik internal disebabkan karena faktor tingkat pendidikan yang dimiliki oleh orang tersebut. Seseorang yang berpendidikan tinggi (lebih dari SMA) selalu memiliki efikasi politik eksternal yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan efikasi politik internal. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan data di lapangan yang menunjukkan efikasi politik eksternal lebih tinggi daripada efikasi politik internal, karena subjek penelitian adalah mahasiswa disabilitas yang berpendidikan tinggi (lebih dari SMA). Subjek penelitian dari Acock dan Clarke (1990:87) adalah warga Amerika secara umum, tidak dalam keadaan disabilitas. Dari dua hasil penelitian tersebut dapat diketahui, bahwa tidak ada perbedaan antara orang dalam keadaan disabilitas atau tidak disabilitas, apabila memiliki pendidikan tinggi maka efikasi politik eksternalnya akan lebih tinggi daripada efikasi politik internalnya.

Berdasarkan uji persentase dari Ali (2013:201), diketahui bahwa tingkat efikasi politik mahasiswa disabilitas di Unesa pada pilkada 2020 tergolong sangat tinggi karena memiliki tingkat efikasi politik sebesar 86,905%. Hal ini menunjukkan, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh mahasiswa disabilitas maka akan semakin tinggi pula tingkat efikasi politiknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Verba, dkk. (dalam Caprara, dkk. 2009:1005), yang menjelaskan bahwa pendidikan tinggi akan memperkuat rasa efikasi politik, karena orang dengan pendidikan tinggi memiliki lebih banyak pengetahuan yang membantu dalam proses politik. Senada dengan hasil penelitian Acock dan Clarke

(1990:97), yang dilakukan di Amerika Serikat serta Caprara, dkk. (2009:1008) yang dilakukan di Roma, menjelaskan bahwa orang yang berpendidikan tinggi (pendidikan lebih dari SMA) memiliki efikasi politik yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah (orang yang berpendidikan SMA atau lebih rendah). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori terkait tingkat pendidikan dapat memperkuat tingkat efikasi politik seseorang, juga berlaku bagi mahasiswa disabilitas di Unesa.

Mahasiswa disabilitas yang memiliki efikasi politik internal yang sangat tinggi ditandai dengan mereka memiliki kemampuan untuk memilih kandidat berdasarkan pada pengalaman penguasaan, pengalaman perwakilan, memiliki kemampuan persuasi verbal dan tidak terpengaruh dengan keadaan fisiologis/afektif yang dimiliki. Sedangkan mahasiswa disabilitas yang memiliki efikasi politik eksternal sangat tinggi ditandai dengan, memiliki penilaian yang baik terhadap sistem politik, memiliki pemahaman yang baik terhadap prosedur pemungutan suara, serta dapat merasakan responsivitas lembaga penyelenggara pemilu pada pilkada 2020.

Indikator pengalaman penguasaan mahasiswa disabilitas di Unesa pada pilkada 2020 menunjukkan bahwa, 89,28% mahasiswa disabilitas di Unesa memiliki kepercayaan diri dalam menentukan kandidat pada pilkada 2020 berdasarkan pada pencapaian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga pada pilkada 2020 mereka dengan percaya diri menentukan pilihannya. Data di lapangan menunjukkan, bahwa pengalaman pencapaian sebelumnya yang dialami oleh mahasiswa disabilitas berupa perasaan puas terhadap kandidat yang dipilih pada kegiatan pemilu yang diikuti sebelum pilkada 2020. Perasaan puas tersebut disebabkan karena, mereka merasa telah berhasil memilih kandidat pada pemilu sebelumnya. Penilaian tersebut didasari pada, terpenuhinya kebutuhan pemilih disabilitas dalam kegiatan pemilu saat ini dan terakomodasinya kepentingan para pemilih disabilitas. Perasaan pencapaian yang dirasakan pemilih disabilitas membuat mereka merasa memiliki kemampuan untuk menentukan kandidat dalam kegiatan pemilu. Oleh sebab itu, pada saat pelaksanaan pilkada 2020, mahasiswa disabilitas di Unesa yakin dalam menentukan pilihannya.

Penelitian terkait pengalaman penguasaan yang baik akan mempengaruhi tingkat efikasi politik seseorang. Sesuai dengan hasil penelitian dari Beaumont (dalam Sohl, 2010:15), yang dilakukan pada 481 mahasiswa yang mengikuti program politik. Metode yang digunakan adalah survei pra dan pasca. Hasil penelitian Beaumont menunjukkan, sebelum mahasiswa mengikuti program politik mereka belum memiliki pengetahuan politik, keterampilan, dan motivasi untuk terlibat dalam politik

secara bertanggung jawab. Setelah mengikuti program politik dan dilakukan survei pasca, hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki penguasaan terkait elemen kunci dari keterlibatan politik, seperti pemahaman politik, keterampilan, dan motivasi yang berkembang secara signifikan. Mahasiswa yang memiliki penguasaan yang baik terhadap elemen kunci dari keterlibatan politik cenderung memiliki tingkat efikasi politik yang tinggi. Mahasiswa yang memiliki efikasi politik yang tinggi banyak terlibat dalam kegiatan politik, seperti mengikuti pemilu, mengekspresikan suara politik dan bergabung dalam sebuah komunitas. Melalui survei yang dilakukan Beaumont (dalam Sohl, 2010:15), dapat diketahui bahwa pengalaman penguasaan akan meningkatkan tingkat efikasi politik seseorang, sebab tingkat efikasi politik dapat ditingkatkan dengan pengalaman politik di dunia nyata. Pengalaman penguasaan 481 mahasiswa yang mengikuti program politik membantu mereka untuk merasakan pencapaian dalam keterlibatan diranah politik. Perasaan penguasaan dalam elemen kunci dari keterlibatan politik, membuat mereka memiliki kepercayaan diri ketika mengikuti pemilu, mengekspresikan suara politik dan bergabung dalam sebuah komunitas.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan hasil penelitian dari Beaumont (dalam Sohl, 2010:15), dapat disimpulkan bahwa pengalaman penguasaan yang dirasakan seseorang akan meningkatkan tingkat efikasi politik orang tersebut. Sehingga, ketika mereka akan melakukan tindakan politik orang tersebut akan memiliki kepercayaan diri. Pada dasarnya seseorang dikatakan memiliki tingkat efikasi politik yang tinggi, apabila orang tersebut dapat memiliki keyakinan, bahwa individu tersebut dapat melakukan tindakan tertentu berdasarkan pada kemampuannya sendiri. Apabila keyakinannya berhasil atau benar-benar terjadi, maka akan menghasilkan perubahan pada dirinya maupun masyarakat. Dengan kata lain, apabila seseorang tidak memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuannya sendiri dapat diartikan bahwa orang tersebut memiliki tingkat efikasi politik yang rendah.

Tingkat efikasi politik yang rendah, membuat individu tidak memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuan yang dimiliki ketika akan melakukan tindakan politik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Budi (2019:194-195), yang dilakukan pada pemilih disabilitas di Purbalingga ketika Pilgub Jateng 2018. Hasil penelitian menunjukkan, salah satu alasan pemilih disabilitas apolitis atau tidak memberikan suaranya ketika Pilgub Jateng 2018, karena bagi pemilih disabilitas partisipasinya tidak akan memberikan perubahan berarti bagi kehidupan mereka, terutama pada kehidupan sosial dan ekonomi. Penilaian yang dilakukan oleh pemilih

disabilitas di Purbalingga dipengaruhi oleh efikasi politik internal dan eksternal dari masing-masing pemilih. Pada efikasi politik internal disebabkan karena pemilih disabilitas di Purbalingga tidak memiliki pengalaman penguasaan yang cukup baik, sehingga mereka meragukan kemampuan yang dimiliki dalam menentukan kandidat yang akan dipilih. Pada tingkat efikasi politik eksternal berkaitan dengan keyakinan mahasiswa disabilitas di Unesa terhadap kemampuannya untuk merubah sistem politik yang sedang berlangsung.

Pengalaman penguasaan yang kurang baik membuat seseorang memiliki tingkat efikasi politik yang rendah, sehingga menyebabkan orang tersebut tidak memiliki rasa percaya terhadap kemampuannya, dan juga tidak percaya pada sistem politik yang sedang berlaku. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Zainulmillah (2017:6-7), yang menjelaskan bahwa rendahnya tingkat efikasi politik yang dimiliki membuat individu tidak percaya dalam melakukan kegiatan politik dan tidak mempercayai sistem demokrasi yang sedang berlaku. Ketidakpercayaan seseorang terhadap sistem politik yang sedang berlaku, dan tidak percaya terhadap kemampuan yang dimiliki untuk membuat perubahan merupakan ciri bahwa orang tersebut memiliki tingkat efikasi politik yang rendah.

Pengalaman penguasaan berkaitan dengan pengalaman perwakilan masing-masing individu. Sebelum seseorang yakin dalam melakukan tindakan politik, seseorang harus menyeleksi kandidat yang akan dipilihnya dan mempercayai kandidat tersebut akan memperjuangkan kepentingan politiknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Bandura (2006:310-311), yang menjelaskan bahwa pengalaman perwakilan terjadi ketika seseorang melihat orang lain melakukan tugas tertentu dan dampaknya dianggap semakin kuat apabila individu tersebut dapat mengidentifikasi dengan orang lain.

Berdasarkan pada data yang diperoleh di lapangan dapat diketahui bahwa, 85,71% mahasiswa disabilitas di Unesa melakukan identifikasi kepada para kandidat bersama teman dan keluarga sebelum memutuskan untuk memilih pada pilkada 2020. Selain itu, mahasiswa disabilitas di Unesa secara aktif mengamati para kandidat dengan kritis, sehingga dapat mempercayai pilihannya berdasarkan *track record* dan kualitas dari para kandidat. Hasil penelitian tersebut senada dengan hasil penelitian dari Zainal, dkk. (2018:115), yang menjelaskan salah satu alasan pemilih disabilitas di Yayasan Yukartuni Makassar memilih dalam Pileg 2014 karena mereka melihat kinerja dari para kandidat dan percaya bahwa kandidat yang dipilih akan memperjuangkan aspirasi kelompok disabilitas. Pada dasarnya pengalaman perwakilan terjadi ketika seseorang melihat orang lain dan mempercayai orang tersebut. Dalam kehidupan politik, pengalaman perwakilan dapat terjadi ketika seseorang melihat orang

kampanye dan orang tersebut menjadi percaya terhadap orang yang sedang kampanye, maka ketika itu pengalaman perwakilan terjadi.

Pengalaman perwakilan dapat terjadi melalui beberapa proses, tidak hanya melalui proses seseorang melihat kemudian menjadi percaya. Proses lain, yang dapat dilakukan untuk merasakan pengalaman perwakilan dijelaskan oleh Bandura (2006:311), pengalaman perwakilan dapat terjadi ketika seseorang melihat orang dengan latar belakang berbeda, dan karakteristik berbeda telah mencapai sesuatu dalam politik, sehingga individu tersebut percaya bahwa ia dapat melakukan hal yang sama. Dengan kata lain, pemilih disabilitas dapat memotivasi dirinya untuk menjadi kandidat dalam pemilu, apabila pemilih disabilitas melihat orang yang tidak dalam keadaan disabilitas berhasil mencapai tujuannya dengan menjadi kandidat pada pemilu. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Fitri (2019:43) yang menjelaskan bahwa terdapat 35 kandidat penyandang disabilitas yang ikut dalam Pileg 2019, dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok disabilitas dan sebagai upaya untuk mencapai kekuasaan tertentu dalam kehidupan politik.

Indikator persuasi verbal mahasiswa disabilitas di Unesa pada pilkada 2020 diperoleh ketika mahasiswa disabilitas mendapatkan persuasi verbal dari orang lain terlebih dahulu, misalnya ketika mengikuti kampanye. Persuasi verbal dari orang lain akan menjadi kemampuan persuasi verbal mahasiswa disabilitas di Unesa ketika mereka percaya dengan kandidat yang sedang melakukan kampanye. Setelah mereka percaya dengan kandidat tersebut, mereka mampu mengajak orang lain untuk memilih kandidat itu, maka ketika itu mahasiswa disabilitas memiliki kemampuan persuasi verbal yang awalnya berasal dari persuasi verbal orang lain. Dengan kata lain, kemampuan persuasi verbal tidak dapat melekat pada diri seseorang tanpa persuasi verbal dari orang lain. Mahasiswa disabilitas yang mampu mengajak orang lain untuk memilih kandidat yang dipercaya berarti mahasiswa disabilitas tersebut memiliki kemampuan persuasi verbal. Data di lapangan menunjukkan 86,904% mahasiswa disabilitas di Unesa memiliki kemampuan persuasi verbal. Hal tersebut terjadi ketika responden mengajak teman dan keluarga untuk memilih kandidat yang dipercaya, karena mereka percaya kandidat tersebut dapat memperjuangkan hak pemilih disabilitas setelah menganalisis visi, misi, dan program yang ditawarkan selama proses kampanye.

Kemampuan persuasi verbal juga dimiliki oleh penyandang disabilitas di Jember. Secara individu mereka memberikan wawasan kepada penyandang disabilitas lain tentang perlunya partisipasi politik bagi pemilih disabilitas dan memberikan contoh kepada penyandang disabilitas yang lain agar menjadi penggerak di

masyarakat sekitarnya (Mais dan Yaum, 2019:85-86). Selain itu, beberapa penyandang disabilitas di Kabupaten Jember memiliki motivasi yang kuat untuk aktif dalam politik praktis, seperti ikut berpartisipasi sebagai kader parpol, calon legislator dan panitia penyelenggara pemilu. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemilih disabilitas secara umum juga memiliki kemampuan persuasi verbal seperti mahasiswa disabilitas di Unesa, apabila memiliki tingkat efikasi politik yang tinggi.

Hasil penelitian pada indikator keadaan fisiologis/afektif menunjukkan bahwa keadaan fisiologis yang dimiliki responden tidak membuat mereka merasa terdiskriminasi ketika berpartisipasi pada pilkada 2020. Mahasiswa disabilitas sadar bahwa setiap orang memiliki peran yang sama tanpa melihat keadaan fisiologis yang dimiliki. Keadaan tersebut menjadikan mahasiswa disabilitas menjadi pemilih yang memiliki kepercayaan diri dalam memperjuangkan haknya. Memilih dalam pilkada merupakan kontribusi mahasiswa disabilitas di Unesa dalam memperjuangkan kepentingannya. Hal ini sesuai dengan pendapat verba, dkk. (dalam Sohl 2010:7), yang menyatakan bahwa efikasi politik berkaitan erat dengan kepentingan politik seseorang. Seseorang yang memiliki efikasi politik yang tinggi akan memperjuangkan kepentingan politiknya apapun rintangannya. Kepercayaan diri mahasiswa disabilitas di Unesa, dalam memperjuangkan kepentingannya merupakan wujud tingginya tingkat efikasi politik yang dimiliki.

Tingginya tingkat efikasi politik yang dimiliki oleh mahasiswa disabilitas di Unesa membuat mereka sadar bahwa keadaan fisiologi/afektifnya yang dimiliki bukan sebuah hambatan dalam partisipasi politik. Keadaan tersebut, berbanding terbalik dengan mereka yang memiliki tingkat efikasi politik yang rendah. Seseorang yang memiliki tingkat efikasi politik rendah cenderung menjadikan keadaan fisiologi/afektifnya sebagai hambatan dalam berpartisipasi di bidang politik. Berdasarkan hasil penelitian Budi (2019:195), secara umum keadaan fisiologis pemilih disabilitas mempengaruhi seseorang dalam partisipasi politik. Pemilih disabilitas di Jawa Tengah cenderung apatis, sebab mereka menganggap dengan keterbatasan yang dimiliki membuat pemilih disabilitas kurang mampu memahami dinamika serta proses politik yang terjadi, sehingga mereka memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Dari dua kasus tersebut dapat diketahui bahwa tingkat efikasi politik yang dimiliki oleh seseorang memiliki peran penting dalam tindakan politik orang tersebut.

Dimensi efikasi politik internal dan efikasi politik eksternal merupakan dua dimensi yang saling berkaitan. Sehingga, kedua dimensi tersebut saling mempengaruhi.

Hubungan kedua dimensi tersebut dapat dilihat ketika pemilih disabilitas memiliki pengalaman penguasaan yang kurang baik, maka mereka tidak percaya terhadap sistem politik yang sedang berlangsung. Hal tersebut disebabkan karena mereka menilai pemerintah tidak responsif terhadap aspirasi dari pemilih disabilitas.

Tingkat efikasi politik pada indikator penilaian mahasiswa disabilitas di unesa pada pilkada 2020 terhadap sistem politik tergolong sangat tinggi, karena memiliki persentase sebesar 89,28%. Data tersebut menunjukkan kepercayaan dari responden terhadap sistem politik yang dapat diubah dengan berpartisipasi dalam bidang politik. Mahasiswa disabilitas menilai masih ada beberapa kebijakan yang tidak sesuai harapan, namun mereka yakin bahwa mereka dapat membuat perubahan dengan memberikan suaranya ketika pilkada 2020.

Tingkat efikasi politik yang dimiliki oleh seseorang, dapat menjadi acuan dalam memprediksi tindakan yang akan diambil ketika berpartisipasi di bidang politik. Menurut Sohl (2010:12), efikasi politik yang dirasakan seseorang merupakan faktor penting dalam memprediksi perilaku politik orang tersebut. Pendapat tersebut senada dengan pendapat Caprara, dkk. (2009:1003), yang mengatakan bahwa tindakan politik seseorang dapat diprediksi berdasarkan pada tingkat efikasi politik yang dirasakan oleh seseorang. Dengan kata lain, tindakan politik seseorang dapat diprediksi berdasarkan pada tingkat efikasi politik yang dimiliki oleh orang tersebut.

Seseorang yang memiliki tingkat efikasi politik tinggi cenderung percaya, bahwa sistem politik dapat diubah. Sedangkan, orang yang memiliki tingkat efikasi politik yang rendah cenderung tidak percaya bahwa sistem politik dapat diubah. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Caprara, dkk. (2009:1003), yang menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat efikasi politik seseorang maka semakin baik pula penilaiannya terhadap sistem politik yang dapat diubah. Hal senada juga diungkapkan oleh Zainal, dkk. (2018:116), melalui hasil penelitian yang menjelaskan bahwa pemilih disabilitas di Yayasan Yukartuni Makassar, memutuskan untuk memilih dalam Pileg tahun 2014, karena mereka memiliki penilaian, bahwa sistem politik dapat diubah melalui kontribusinya dalam bidang politik. Pendapat terkait tingkat efikasi politik yang rendah membuat seseorang tidak percaya bahwa sistem politik tidak dapat diubah, sesuai dengan hasil penelitian dari Zainulmillah (2017:6-7); Budi (2019:194-195), yang menjelaskan bahwa rendahnya tingkat efikasi politik seseorang menjadikan orang tersebut tidak memiliki kepercayaan bahwa sistem politik dapat diubah dengan keikutsertaannya dalam kehidupan politik.

Indikator penilaian mahasiswa disabilitas di Unesa pada pilkada 2020 terhadap prosedur pemungutan suara menunjukkan, bahwa mahasiswa disabilitas memiliki

tingkat efikasi politik yang sangat tinggi dengan persentase sebesar 83,92%. Tingginya efikasi politik yang dimiliki oleh mahasiswa disabilitas di Unesa disebabkan karena mahasiswa disabilitas di Unesa tidak mengalami kesulitan dalam mengakses informasi terkait prosedur pelaksanaan pilkada. Sehingga, mereka memahami prosedur pelaksanaan pilkada dan memutuskan untuk memberikan suaranya ketika pilkada 2020. Data di lapangan menunjukkan alasan mahasiswa disabilitas di Unesa memiliki penilaian yang baik terhadap prosedur pemungutan suara, karena sebagian besar mahasiswa disabilitas secara aktif mencari informasi terkait prosedur pemungutan suara melalui internet, sebab mereka tidak kesulitan dalam mengakses informasi tersebut.

Kemudahan akses dalam mencari informasi berkaitan dengan pendidikan seseorang. Menurut Caprara, dkk. (2009:1005), pendidikan tinggi akan membuat seseorang memiliki lebih banyak pengetahuan. Tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang berkorelasi dengan aksesibilitas informasi (Diadji, 2016:1). Kemudahan dalam mengakses informasi membuat seseorang memiliki banyak pengetahuan, sehingga dapat meningkatkan efikasi politiknya. Pendapat ini dibuktikan dengan hasil penelitian Budi (2019:195), yang menjelaskan bahwa secara umum pemilih disabilitas di Purbalingga memiliki tingkat efikasi politik rendah, sebab mengalami kesulitan dalam akses informasi, sehingga menyebabkan mereka tidak memahami proses pelaksanaan Pilgub Jateng 2018. Keadaan tersebut berbanding terbalik, dengan mahasiswa disabilitas di Unesa, sebab mereka tidak mengalami kesulitan dalam mengakses informasi. Kemudahan akses informasi tersebut membuat mahasiswa disabilitas memiliki banyak pengetahuan, sehingga dapat meningkatkan tingkat efikasi politiknya.

Efikasi politik mahasiswa disabilitas di Unesa pada indikator penilaian terhadap lembaga penyelenggara pemilu pada pilkada 2020 tergolong sangat tinggi karena memiliki persentase sebesar 89,28%. Tingginya persentase indikator tersebut disebabkan karena mahasiswa disabilitas di Unesa tidak kesulitan dalam memahami pelaksanaan pilkada. Mahasiswa disabilitas di Unesa tidak mengalami kesulitan, karena mereka mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh KPU melalui Zoom Meetings. KPU bekerja sama dengan PSLD Unesa untuk mengumpulkan mahasiswa disabilitas yang mengikuti pilkada 2020, agar mereka memperoleh sosialisasi dengan jelas.

Peran PSLD bagi mahasiswa disabilitas ketika pilkada adalah sebagai tempat untuk membantu KPU dalam menyosialisasikan kegiatan pemilu kepada mahasiswa disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian Al-Haroma (2017:592), KPUD hanya menyosialisasikan pelaksanaan pilkada kepada komunitas disabilitas saja, sedangkan

faktanya tidak semua pemilih disabilitas bergabung dalam komunitas. Oleh sebab itu, perlu adanya PSLD di setiap Universitas untuk memudahkan mahasiswa disabilitas dalam memahami pelaksanaan pemilu. KPU belum bisa menjangkau seluruh pemilih disabilitas yang tidak tergabung dalam komunitas. Dengan adanya PSLD dapat menjamin mahasiswa disabilitas memperoleh sosialisasi dari KPU, seperti mahasiswa disabilitas di Unesa yang memperoleh sosialisasi pada pilkada 2020.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, dibutuhkan dalam menumbuhkan efikasi politik mahasiswa disabilitas. Menurut Riedel dan Sullivan (dalam Zainulmillah, 2017:7), sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait politik akan mempengaruhi efikasi politik seseorang. Dengan kata lain, apabila sosialisasi yang dilakukan oleh KPU tersampaikan dengan baik akan membuat seseorang memiliki tingkat efikasi politik yang tinggi. Namun, apabila sosialisasi yang dilakukan belum tersampaikan dengan baik, maka akan membuat seseorang memiliki tingkat efikasi politik yang rendah. Hal ini dibuktikan dengan data di lapangan yang menunjukkan bahwa dari 28 responden, terdapat 24 mahasiswa disabilitas atau 85,71% responden tidak mengalami kesulitan dalam memahami pelaksanaan pilkada, sebab mereka mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan menilai sosialisasi tersebut cukup jelas. Sedangkan, hasil penelitian Zainal, dkk. (2018:116); Budi (2019:195), menjelaskan bahwa pemilih disabilitas memilih untuk apatis karena sosialisasi yang dilakukan oleh KPU belum merata dan belum tersampaikan dengan baik. Dengan demikian, untuk meningkatkan tingkat efikasi politik seseorang perlu peran KPU dalam menyosialisasikan kegiatan pemilu dengan baik.

Penilaian terhadap lembaga penyelenggara pemilu pada pilkada 2020 juga mengacu pada responsivitas yang dirasakan mahasiswa disabilitas di Unesa terhadap aksesibilitas yang dirasakan pada pilkada 2020. Data di lapangan menunjukkan, bahwa mahasiswa disabilitas telah merasakan responsivitas KPU dalam mewujudkan aksesibilitas bagi mahasiswa disabilitas pada pilkada 2020. Penilaian tersebut didasarkan pada responsivitas KPU dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan mahasiswa disabilitas untuk memilih dalam pilkada. Responsivitas tersebut berupa tersedianya surat suara berbraile dan tidak ada TPS yang bertanggung. Selain itu, responsivitas KPU yang dirasakan mahasiswa disabilitas di Unesa juga dalam proses pendataan daftar pemilih tetap. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dapat diketahui, bahwa KPU telah memastikan mahasiswa disabilitas di Unesa beserta kelompok disabilitas lain terdaftar sebagai DPT. Berbagai upaya yang dilakukan oleh KPU untuk mewujudkan aksesibilitas

bagi pemilih disabilitas membuat mahasiswa disabilitas di Unesa memiliki tingkat efikasi politik sangat tinggi.

Terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan KPU untuk melakukan optimalisasi aksesibilitas bagi pemilih disabilitas, fakta di lapangan menunjukkan masih ada pemilih disabilitas yang belum mendapatkan aksesibilitas dalam pemilu. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian Zainal, dkk. (2018:116-118); Al-Haroma (2017), yang menjelaskan bahwa tidak semua surat suara dicetak dengan braille dan masih terdapat penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam DPT. Surat suara yang tidak berbraille tentu akan menyulitkan bagi pemilih disabilitas netra. Oleh sebab itu, perlu optimalisasi peran KPU dalam menjamin aksesibilitas bagi pemilih disabilitas.

Penyebab belum meratanya aksesibilitas bagi pemilih disabilitas dapat disebabkan karena prinsip aksesibilitas bagi pemilih disabilitas belum diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilu. Namun KPU selalu membuat peraturan teknis tentang aksesibilitas bagi pemilih disabilitas pada setiap pemilu yang tentunya tidak bertentangan dengan perundang-undangan (Soekanwo, dkk. 2016:iii-iv). Pendapat ini sejalan dengan pendapat Mais dan Yaum (2019:86), yang menjelaskan adanya perbedaan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas dalam pemilu. Keadaan tersebut disebabkan karena perbedaan tingkat pemahaman diantara para penyelenggara pemilu yang tentunya bersifat tidak disengaja dan sering dilakukan oleh oknum. Hal tersebut terjadi, karena memang belum ada aturan secara eksplisit dalam Perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan. Oleh sebab itu, perlu adanya persamaan pemahaman diantara para penyelenggara pemilu agar seluruh pemilih disabilitas dapat menikmati haknya dalam pemilu tanpa terhambat oleh keterbatasan yang mereka miliki.

PENUTUP

Simpulan

Tingginya tingkat efikasi politik mahasiswa disabilitas di Unesa disebabkan, karena efikasi politik internal dan efikasi politik eksternal yang dimiliki responden tinggi. Tingginya efikasi politik internal mahasiswa disabilitas di Unesa menunjukkan, bahwa mahasiswa disabilitas di Unesa telah memiliki keyakinan terhadap kemampuan dirinya untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Bentuk kepercayaan diri mahasiswa disabilitas terhadap kemampuan yang dimiliki dalam bidang politik dapat dilihat ketika responden mampu menentukan kandidat yang dipilih pada pilkada 2020 berdasarkan pengalaman penguasaan dan pengalaman perwakilan yang dimiliki. Selain itu, mahasiswa disabilitas juga mampu merubah persuasi verbal dari orang lain menjadi kemampuan

persuasi verbal yang melekat pada dirinya. Dengan demikian, mereka mampu mengajak teman dan keluarganya untuk memilih kandidat yang dipercaya dapat memperjuangkan aspirasi pemilih disabilitas. Mahasiswa disabilitas di Unesa tidak menjadikan keadaan fisiologisnya sebagai alasan untuk merasa terdiskriminasi, karena mereka menilai setiap orang memiliki peran yang sama dalam kehidupan politik.

Tingginya efikasi politik eksternal mahasiswa disabilitas di Unesa menunjukkan, bahwa mahasiswa disabilitas memiliki keyakinan apabila sistem politik dapat diubah. Perubahan tersebut dapat terwujud apabila mahasiswa disabilitas beserta pemilih disabilitas yang lain, secara bersama-sama ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Selain itu, efikasi politik eksternal dapat ditingkatkan apabila seseorang memiliki kemudahan akses informasi, sebab kemudahan akses informasi membuat seseorang memiliki banyak pengetahuan. Banyaknya pengetahuan dalam bidang politik dapat meningkatkan tingkat efikasi politik seseorang. Tingkat efikasi politik seseorang dapat dipengaruhi oleh sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Apabila sosialisasi yang dilakukan oleh KPU tersampaikan dengan baik, maka akan membuat seseorang memiliki tingkat efikasi politik yang tinggi. Namun, apabila sosialisasi yang dilakukan oleh KPU belum tersampaikan dengan baik, maka akan membuat seseorang memiliki tingkat efikasi politik yang rendah.

Efikasi politik eksternal mahasiswa disabilitas di Unesa lebih tinggi daripada efikasi politik internal. Hal ini disebabkan, karena responden memiliki pendidikan tinggi (pendidikan lebih dari SMA). Orang yang berpendidikan tinggi selalu memiliki efikasi politik eksternal yang lebih tinggi daripada efikasi politik internal. Keadaan demikian selalu terjadi, kepada orang yang dalam keadaan disabilitas maupun tidak dalam keadaan disabilitas. Faktor yang mempengaruhi efikasi politik eksternal lebih tinggi daripada efikasi politik internal adalah tingkat pendidikan, bukan keadaan fisiologis.

Saran

Pentingnya PSLD (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas) di setiap Universitas untuk membantu KPU dalam menyosialisasikan kegiatan pemilu bagi mahasiswa disabilitas. Hal tersebut disebabkan karena, KPU belum bisa menjangkau seluruh pemilih disabilitas yang tidak tergabung dalam komunitas. Sosialisasi yang dilakukan KPU akan mempengaruhi tingkat efikasi politik seseorang. Jadi, apabila tidak ada PSLD di setiap Universitas, maka akan mempengaruhi tingkat efikasi politik mahasiswa disabilitas, sebab tidak ada jaminan mahasiswa disabilitas menerima sosialisasi dari KPU. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PSLD Unesa

pada 02 Juli 2021, dapat diketahui bahwa KPU melakukan sosialisasi kepada mahasiswa disabilitas melalui PSLD Unesa dengan media *Zoom Meetings*. Sosialisasi yang dilakukan KPU dilakukan melalui *Zoom Meetings*, karena pilkada 2020 dilaksanakan ditengah pandemi *covid-19*. Selain itu, perlu adanya regulasi terkait aksesibilitas bagi pemilih disabilitas secara eksplisit. Dengan demikian, tidak ada perbedaan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas dalam kehidupan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Acock, A.C. dan Clarke, H.D. 1990. Alternative measures of political efficacy: models and means. *QualiO' & Quantity*. Vol. 24 (9). Hal. 87-105.
- Adriansyah, Jefri. 2021. *Yang Harus Menunda Pilkada pada 2022 dan 2023*. https://populicenter.org/gagasan/esai/tunda-pilkada/tunda_pilkada.php. Diakses 18 Juni 2021.
- Ali, Mohammad. 2013. *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Al-Haroma, A.I. 2017. Praktik Hak Politik Penyandang Disabilitas Kota Surabaya. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Vol. 05 (02). Hal. 592-608.
- Bandura. 2006. Self-Efficacy Beliefs of Adolescents Chapter 14. *Information Age Publishing*. Hal. 307–337.
- Budi, A.S. 2019. Ketertarikan Politik Penyandang Disabilitas dalam Konteks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga. *Journal of Politic and Government Studies*. Vol. 8 (1). Hal. 191-200.
- Caprara, G.V., Capanna, C., Vecchione, M. 2009. Perceived Political Self-Efficacy: Theory, Assessment, and Applications. *European Journal of Social Psychology*. Vol. 39. Hal. 1002–1020.
- Dewi, D.A. 2018. Modul Uji Validitas dan Reliabilitas. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Diadji, Kuntoro. 2016. Aksesibilitas Informasi dan Kesenjangan Pengetahuan Petani Kasus Program Layanan Informasi Desa di Kabupaten Karawang. *Thesis*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Fitri, Adelia. 2019. Representasi Kelompok Disabilitas dalam Pencalegan Tahun 2019. *Jurnal Transformative*. Vol. 5 (2). Hal. 37-51.
- Fitriah, E.A. 2014. Personal Values Dan Internal Political Efficacy Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Pemilih Pemula. *Jurnal Ilmiah Psikologi*. Vol. 1 (2). Hal. 244 – 254.
- Gaffar, Affan. 1997. Menampung Partisipasi Rakyat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 1 (1). Hal. 8-26.
- Haryanti, Amelia. 2016. Peran dan Sikap Guru dalam Mensosialisasikan Pendidikan Politik di Sekolah. *PEKOBIS Jurnal*. Vol. 1 (1). Hal. 70-85.
- Hie, Y.H. 2018. Peranan Guru Sebagai Agen Sosialisasi Politik dalam Pemupukan Perpaduan Etnik Di Sekolah Daerah Petaling, Selangor, Malaysia. *Tesis*. Selangor: Universiti Putra Malaysia
- Its.ac.id. 2021. *Fakultas, Jurusan, dan Prodi*. <https://www.its.ac.id/id/tentangits/profilingkat/fakultas-jurusan-prodi/>. Diakses 30 Januari 2021.
- lldikti5.kemdikbud.go.id. 2021. 50 Universitas Terbaik di Indonesia Versi Webometrics 2020, UI Teratas. <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/50-universitas-terbaik-di-indonesia-versi-webometrics-2020-ui-teratas>. Diakses 30 Januari 2021.
- Mais, Asrorul dan Yaum, L.A. 2019. Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*. Vol. 2 (2). Hal. 78-87.
- Mattila, Mikko dan Achillefs, Papageorgiou. 2017. Disability, Perceived Discrimination and Political Participation. *International Political Science Review*. Vol. 38 (5). Hal. 505-519.
- Matulesy, Andik. 2008. Model Kausal Partisipasi Politik Aktivistis Gerakan Mahasiswa. *Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Matulesy, Andik dan Samsul. 2013. *Political Efficacy, Political Trust dan Collective Self Esteem* dengan Partisipasi dalam Gerakan Mahasiswa. *Jurnal Penelitian Psikologi*. Vol. 4 (1). Hal. 84-106.
- Purwanto, N.A. 2008. Pengaruh Politik dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. Vol. 2 (4). Hal. 1-11.
- Sabatini, Afriliya. 2018. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 di Kecamatan Tenayan Raya. *JOM FISIP*. Vol. 5 (1). Hal. 1-16.
- Soekanwo, A., Sebayang, H., Sar, S. 2016. *Modul Ringkas Pemilu Akses bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: PPUA-Penca.
- Sohl, Sofia. 2010. Political Efficacy Revisited – A Clearer Concept and A Way of Approaching Political Inequality. *Working paper, ECPR Joint Sessions 2010*. Germany: Örebro University.
- Supena, A., Yusuf, M., Budiarto., Azizah, N., Ridwan, R.T. 2017. *Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi*.
- Ub.ac.id. 2021. *Program Sarjana*. <https://ub.ac.id/id/academic/undergraduate-academic-program/>. Diakses 30 Januari 2021.
- Unair.ac.id. 2021. *Program Sarjana*. <https://www.unair.ac.id/site/menu/show/51/program-sarjana.html>. Diakses 30 Januari 2021.

- Um.ac.id. 2021. *Fakultas*. <https://um.ac.id/akademik/fakultas/>. Diakses 30 Januari 2021.
- Unej.ac.id. 2021. *Program Studi*. https://unej.ac.id/pendidikan/#1599795_671180-974ffe63-00ba. Diakses 30 Januari 2021.
- Unesa.ac.id. 2020. *Unesa Menuju Kampus Inklusif Berwawasan Global*. <https://www.unesa.ac.id/unesa-menuju-kampus-inklusif-berwawasan-global>. Diakses 09 Agustus 2020.
- Unesa.ac.id. 2021. *Program Studi dan Daya Tampung Universitas Negeri Surabaya Tahun Akademik 2014/2015*. <https://www.unesa.ac.id/pengumuman/176/program-studi-dan-daya-tampung-universitas-negeri-surabaya-tahun-akademik-20142015>. Diakses 30 Januari 2021.
- World Health Organization. 2011. *World report on disability 2011*. <http://www.who.int/disabilities/world-report/2011/report.pdf>. Diakses 18 November 2020.
- Zainal, N.A., Iqbal, M.T., dan Razak, R.M. 2018. Partisipasi dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Yayasan Yukartuni Makassar pada Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Politik Profetik*. Vol. 6 (1). Hal. 106-119.
- Zainulmillah, Aqil. 2017. Hubungan Efikasi Politik Dengan Partisipasi Politik pada Pemilih Pemula di Kecamatan Blimbing Kota Malang. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.